

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dunia akuntansi yang pesat, tidak hanya memberikan manfaat untuk warga luas namun pula memberikan manfaat untuk organisasi ataupun lembaga jasa keuangan yang lain. Dalam suatu negara, kegiatan perekonomian pasti dibantu dengan keberadaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi dalam mengatur peredaran uang sehingga tidak memunculkan akibat negatif terhadap warga. Dalam dunia akuntansi yang semakin berkembang pesat, tentu tidak hanya membawa pengaruh baik untuk masyarakat, namun membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan (*fraud*) yang semakin merajalela di berbagai sendi kehidupan baik dalam skala kecil maupun besar. Kecurangan atau penyimpangan dewasa ini semakin berkembang pesat, kegiatan penyimpangan selalu dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan. Maraknya permasalahan tindak kecurangan dalam bidang akuntansi di Indonesia memunculkan keprihatinan serta dibutuhkan atensi spesial dari bermacam pihak (Satcitanandadewi & Wahyuni, 2020).

Berdasarkan pengukuran *Corruption Perfection Index* (CPI) untuk tahun 2018, tingkat korupsi di negara Indonesia menempati posisi 89 dari 180 negara yang diukur. Indonesia berada pada peringkat keempat di Asia Tenggara setelah Singapura dan Brunei Darussalam (Transparency, 2018). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai hal salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak sewajarnya (penyalahgunaan atau penggelapan).

Kecurangan (*fraud*) akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis di dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian di banyak pihak. *Statement of auditing standart* No. 99 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit (Budiantari et al., 2017).

Akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya, hal ini sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Udayani & Sari, 2017). Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atas dokumen palsu atau yang menyesatkan dan menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik saat ini. Banyak lembaga yang melakukan praktik kecurangan baik sektor publik maupun sektor swasta. Bahkan di Bali tindak kecurangan terjadi pada

tingkat paling rendah yaitu tindak kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *krama desa pakraman*. LPD memiliki sistem pengelolaan yang kental dengan hukum adat dan kearifan lokal di Bali (Sudiarta, 2017). LPD mencatat total asset Lembaga keuangan milik desa mencapai Rp 21,7 triliun hingga akhir tahun 2019 total tersebut dibukukan oleh sebanyak 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten (m.bisnis.com, 2019). Dengan ini terbukti bahwa keberadaan LPD memberikan kontribusi yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa adat, bahkan asset yang dimiliki oleh lembaga ini dapat mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan LPD hingga akhir tahun 2019, asset yang dikelola LPD se-Bali mencapai Rp 21,7 Triliun.

Pesatnya perkembangan LPD tidak lepas dari terjadinya permasalahan LPD dengan kondisi yang tidak sehat bahkan LPD mengalami macet yang dapat menghambat kegiatan operasional LPD. Kondisi LPD macet muncul karena pengelola LPD tidak selektif sebelum memutuskan realisasi kredit kepada nasabah peminjam (Saputra, 2015). LPD yang macet dan yang tidak sehat terjadi akibat kurang taatnya penerapan sistem manajemen, lemahnya pengendalian internal pada LPD, terjadinya kesenjangan informasi serta penyaluran kredit kurang hati-hati (Sudiarta, 2017). Penggelapan dana juga merupakan faktor yang menyebabkan LPD masuk kategori macet serta tidak sehat. Pada tahun 2021 sendiri tercatat ada 17 unit LPD yang macet dua diantaranya ada di Kecamatan Blahbatuh yaitu LPD Pasdalem dan LPD Pinda, Desa Saba (Nusa Bali.com, 2021).

Pada tahun 2019, mantan Bendesa Adat Pacung I Nyoman Jaya menjadi terdakwa tidak pidana korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai ketua LPD Pacung Gianyar. Dalam kasus ini Ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 Inyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih (Bali.tribunnews.com). Selain itu di Bangli, kasus kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh I Made Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut Bangli ditetapkan sebagai tersangka. Dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) Pedesaan, Dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 225 Juta (Bali.tribunnews.com).

Beberapa kasus kecurangan akuntansi yang telah dipaparkan tersebut tentu akan membawa dampak negatif bagi LPD, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksi atau menyimpan uangnya di LPD. Berdasarkan penelitian terdahulu, kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dapat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal yang ada pada perusahaan (Budiantari et al., 2017). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017). Pengendalian internal merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan pengendalian internal yang efektif diharapkan pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan

pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi (Dewi, 2017).

Hal yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengurangi terjadinya kecurangan yaitu diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Chandra & Sari, 2015). Apabila suatu instansi memiliki pengendalian internal yang kurang memadai maka akan menimbulkan hambatan dari adanya kesalahan maupun kecurangan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk dan pada akhirnya mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan (Wijaya et al., 2017).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Budiantari et al., 2017). Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian Wijaya et al., (2017), Irwansyah & Syufriadi (2018), dan Kalau & Leksair (2020) yang juga menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila suatu instansi memiliki pengendalian internal yang kurang memadai maka akan menimbulkan hambatan dari adanya kesalahan maupun kecurangan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk dan pada akhirnya mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi juga dapat dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi yang didapatkan oleh karyawan (Wijaya et al., 2017). Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai

pengganti jasa yang telah mereka berikan (Riniwati, 2016). Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, kompensasi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2017).

Kompensasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Seseorang cenderung akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan (Wijaya et al., 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Wijaya et al., 2017). Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian Wulansari et al., (2019) yang juga menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawannya atas apa yang telah mereka kerjakan dapat membuat karyawan tersebut merasa tercukupi sehingga tidak melakukan tindakan kecurangan akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya di mana hal tersebut akan merugikan instansi itu sendiri.

Kecenderungan kecurangan sangat dipengaruhi moralitas yang dimiliki karyawan (Irwansyah & Syufriadi, 2018). Moralitas adalah suatu nilai atau norma yang dimana dapat menjadi pegangan seseorang dalam mengendalikan dan mengatur tingkah lakunya antara baik dan buruk kepada diri sendiri maupun orang lain (Sari, 2017). Kecenderungan *fraud* juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi (Wahyudi, 2016).

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi (Wijaya et al., 2017). Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian Irwansyah & Syufriadi (2018), dan Pujayani & Dewi, (2021) sama-sama menyatakan bahwa bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *postkonvensional*), maka semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi adalah adanya asimetri informasi dalam perusahaan (Samanto & Setyaningsih, 2020). Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent*. Sehingga

principal tidak pernah dapat menemukan kontribusi usaha-usaha *agent* terhadap hasil - hasil perusahaan sesungguhnya (Suprayono, 2015). Asimetri informasi merupakan sebuah keadaan dimana manajer mempunyai akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk berbuat curang (Pertiwi, 2015).

Hasil penelitian terdahulu menyatakan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Irwansyah & Syufriadi, 2018). Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian Samanto & Setyaningsih (2020) dan Silfi & Wahyuni (2021) yang juga menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pada dasarnya kecurangan terjadi jika ada peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan, terlebih dengan adanya asimetri akan semakin meningkatkan kesempatan untuk terjadinya kecurangan akuntansi tersebut.

Berdasarkan fenomena permasalahan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi yang terjadi pada LPD di Kecamatan Blahbatuh khususnya di LPD Pasdalem dan LPD Pinda, Desa Saba yang mengakibatkan kedua LPD tersebut macet serta mengingat pentingnya LPD untuk membantu perekonomian masyarakat pedesaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada LPD Se-Kecamatan Blahbatuh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang hendak dibahas adalah:

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
5. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
4. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

5. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD Se-Kecamatan Blahbatuh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat praktis

Bagi LPD di Kecamatan Blahbatuh, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan pimpinan dalam usaha meningkatkan kinerja para karyawan, dan menurunkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi terutama dilihat dari efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Fraud Diamond Theory*

Fraud diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena *fraud* yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004 (Guhung, 2018). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan *fraud*. Jika dalam Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu *incentive/pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam teori *fraud diamond* mengalami penambahan elemen yaitu *capability/capacity* (kemampuan) (Guhung, 2018).

1. *Incentive/pressure* (tekanan)

Incentive atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan (Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Wijaya et al., 2017).

2. *Opportunity* (peluang/kesempatan)

Elemen *opportunity* dalam kaitannya dengan *fraud* diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak.

3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi et al., 2015). Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha, 2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan *fraud* yang telah terjadi, apalagi jika tindakan *fraud* dilakukan secara terus-menerus.

4. *Capacity/capability* (kemampuan)

Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk

mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014).

Kaitan antara teori *fraud diamond* dengan penelitian ini menekankan pada motif untuk melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan untuk tetap patuh pada aturan seperti mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada atau sebaliknya, menyimpang dari jalur yang sebenarnya. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang memudahkan pelaku dalam melakukan kecurangan.

2.1.2 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Beberapa dua hal yang mendorong kecenderungan kecurangan akuntansi (Udayani & Sari, 2017). Dua hal tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya, hal ini sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atas dokumen palsu atau yang menyesatkan dan

menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) menjelaskan kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain (Halim, 2015). Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan (Udayani & Sari, 2017).

Terdapat dua tipe kecurangan akuntansi (Ananda, 2016), kedua tipe tersebut antara lain yaitu:

- a. Kecurangan eksternal, kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah.
- b. Kecurangan internal, tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu sendiri.

Tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset diuraikan dalam (Arens et al., 2015). Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*):

1. Tekanan / Insentif (*Preceived Pressure*)

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Karyawan mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah financial.

2. Kesempatan (*Preceived opportunity*)

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Kurangnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan dalam suatu perusahaan dapat memicu karyawan untuk melakukan kecurangan. Dan longgarnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan tersebut maka karyawan mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan.

3. Sikap atau Rasionalisasi (*Rationalization*)

Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi (Dewi, 2017), yaitu:

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya. Manajemen cenderung akan melakukan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi bukti-bukti transaksi biasa dengan mengubah besarnya jumlah yang sebenarnya atau mengabaikan aturan akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunannya, memalsukan dokumen-dokumen pendukung,

dan merubah pencatatan jurnal akuntansi terutama dilakukan pada saat mendekati akhir periode. Hal-hal tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan.

2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan. Manajemen secara sengaja melakukan salah saji dengan menghilangkan atau mengabaikan suatu peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan dalam laporan keuangan yang dapat memperdayai pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan laba.
3. Kecenderungan untuk melakukan salah penerapan prinsip akuntansi secara sengaja. Untuk memaksimalkan laba manajemen dapat berbuat curang dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah seperti mengubah asumsi yang terkait dengan pencatatan jumlah, klasifikasi dan pelaporan pada transaksi keuangan.
4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencuri (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang diterima. Manajemen dapat melakukan salah saji yang berasal dari penyalahgunaan atau penggelapan aktiva dengan melakukan rekayasa dalam laporan keuangan untuk menutup-nutupi pencurian aktiva tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.
5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu

diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Karena adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu pihak instansikan berusaha menutupi masalah tersebut dengan melakukan tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Cara yang dilakukan dapat berupa manipulasi, pemalsuan, atau perbuatan catatan akuntansi atau dokumen pendukung laporan keuangan serta menghilangkan, memajukan atau menunda pencatatan transaksi yang seharusnya dilaporkan dalam periode laporan keuangan. Tindakan kecurangan tersebut dapat menyangkut satu atau lebih individu baik manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Dan akibat dari tindakan kecurangan tersebut laporan keuangan yang disajikanpun akan salah dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.3 Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017). Sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai (Snell, 2014).

Pengendalian internal merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan pengendalian internal yang efektif diharapkan pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi (Dewi, 2017).

Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Standar Profesional Akuntansi Publik SA Seksi 319). Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaraannya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut (Arens et al., 2015).

Terdapat empat unsur pokok sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2017), yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama yang dapat dijadikan sebagai alat ukur (Sujarweni, 2015), sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian, merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.
2. Penaksiran risiko, manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.
3. Aktivitas pengendalian, kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.
4. Informasi dan komunikasi, merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturanyang berlaku pada perusahaan.

5. Pemantuan, merupakan kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan.

2.1.4 Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan (Riniwati, 2016). Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, kompensasi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2017). Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis.

Kesesuaian kompensasi dapat diketahui sebagai nilai/*value* yang diterima oleh pegawai atau karyawan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya kepada organisasi dengan melihat hasil dari perhitungan kinerja pegawai atau karyawan tersebut (Riyadi, 2021). Bisa juga diartikan sebagai hak yang harus diterima oleh pegawai atau karyawan atas kewajiban yang telah dikerjakannya berdasarkan nilai standar yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah organisasi setiap kegiatan pasti memiliki tujuan guna mencapai tujuan dari perusahaan, seperti halnya pemberian imbalan atau

kompensasi. Terdapat delapan pokok tujuan pemberian imbalan atau kompensasi (Widodo, 2015), sebagai berikut:

1. Ikatan kerja sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Kepuasan kerja, dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
3. Pengadaan efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.
4. Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi karyawannya.
5. Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turn-over relative* kecil.
6. Disiplin, pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Pengaruh serikat buruh, dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
8. Pengaruh pemerintah, jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompensasi yang diterima oleh pegawai (Riniwati, 2016), yaitu:

1. Gaji, adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.
2. Upah, merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan
3. Insentif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (*pay for performance plan*).
4. Asuransi, merupakan kompensasi nonfinansial yang diberikan perusahaan yang bertujuan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja atau karyawan bersama keluarganya, ketika yang bersangkutan mengalami risiko sosial.
5. Tunjangan, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan/organisasi kepada para pegawainya. Tunjangan tersebut dapat

terdiri dari bermacam-macam seperti tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, atau tunjangan pembangunan.

6. Uang pensiun, dana yang dibayarkan secara regular dengan interval tertentu kepada seorang pekerja (dan keluarganya) setelah berhenti dari perusahaan

2.1.5 Moralitas Individu

Moralitas mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral” kita berbicara “moralitas dari suatu tindakan” berarti bahwa aspek moral adalah perbuatan baik atau buruk (Ningsih, 2020). Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan dari asas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Moralitas adalah suatu nilai atau norma yang dimana dapat menjadi pegangan seseorang dalam mengendalikan dan mengatur tingkah lakunya antara baik dan buruk kepada diri sendiri maupun orang lain (Sari, 2017).

Moralitas merupakan sikap baik dan buruk yang dimiliki oleh seseorang atau individu (Junia, 2016). Moralitas timbul ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran atas kewajiban dan tanggung jawabnya, dan bukan karena ingin memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya (Udayani & Sari, 2017). Pernyataan ini bisa didefinisikan bahwa moralitas setiap orang merupakan perilaku atau sikap baik, dimana orang tersebut bertindak tanpa pamrih atau tidak meminta balasan.

Moralitas adalah kebaikan-kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran tindakan yang diterima oleh masyarakat atau umum meliputi kesatuan sosial maupun lingkungan sosial (Darmadi, 2020). Moralitas mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau budaya yang mengatur tingkah laku. Dilain sisi moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang.

Seseorang yang bermoral memiliki daya tarik untuk berperilaku baik yang memiliki nilai positif. Seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain (Radhiah, 2016).

Nilai moral adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Awalnya belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, seseorang mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai moral (Ali, 2016).

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya. Baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya (Ali, 2016).

Moralitas pada masing-masing individu atau karyawan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darmadi, 2020), yaitu:

- a. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, hidup rukun dan toleran terhadap dengan pemeluk agama lainnya.

- b. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
- c. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi pada agama, etnis, suku, pendapat, sikap dan tindakan orang lain.
- d. Disiplin adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan aturan.

2.1.6 Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent* (Suprayono, 2015). Sehingga *principal* tidak pernah dapat menemukan kontribusi usaha-usaha *agent* terhadap hasil-hasil perusahaan sesungguhnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh *agent*/manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility* bagi dirinya.

Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh *agent* karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu sebagai pengelola, *agent* berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada *principal*. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Semakin banyak informasi internal perusahaan yang diketahui oleh seorang *agent* daripada *principal*, maka *agent* akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

Asimetri informasi merupakan sebuah keadaan dimana manajer mempunyai akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk berbuat curang (Pertiwi, 2015). Pada dasarnya kecurangan terjadi jika ada peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan. Pada penelitian ini terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengelola dan pihak pemakai, jika terjadi kesenjangan informasi maka dapat membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan.

Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur asimetri informasi (Snell, 2014), yaitu:

1. Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan, manajer bawah memiliki lebih banyak informasi daripada manajer atas. Hal tersebut dikarenakan manajer bawah ikut terlibat langsung dan lebih mengetahui kondisi yang ada pada perusahaan.
2. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal, dalam kegiatan operasi unit tanggung jawabnya, manajer bawah lebih mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran yang mereka kelola.
3. Kinerja potensial, manajer bawah dapat lebih baik memperkirakan kinerja potensial unit tanggung jawabnya daripada manajer atas. Hal tersebut dikarenakan manajer bawah memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengoperasian unit tanggung jawabnya.
4. Teknis pekerjaan, untuk mencapai tujuan, manajer bawah lebih mengetahui bagaimana caranya daripada manajer atas.

5. Mampu menilai dampak potensial, manajer bawah lebih dapat menilai risiko yang mungkin terjadi pada operasional unit tanggungjawabnya dikarenakan terlibat langsung.
6. Pencapaian bidang kegiatan, bawahan lebih mengetahui tentang unit tanggungjawabnya dapat memenuhi pencapaian atas target yang telah ditetapkan.

2.1.7 Ketaatan Aturan Akuntansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan yang ada, dan aturan adalah ketentuan atau tindakan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Setiap perusahaan wajib memiliki pedoman dalam menentukan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam perusahaan salah satunya aturan mengenai kegiatan akuntansi. Aturan akuntansi disusun sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ketaatan aturan akuntansi merupakan tindakan wajib untuk menaati ketentuan dan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat (Santini & Wati, 2021).

Secara teoritis, ketaatan akuntansi merupakan kewajiban. Jika laporan keuangan dihasilkan tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan itu dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan dapat menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang sulit ditelusuri auditor (Thoyibatun, 2012). Aturan yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa untuk menjadi dasar dalam penyusunan

laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan – aturan yang harus dipergunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan – aturan yang dikeluarkan oleh IAI (Adelin, 2013).

Terdapat dua tujuan ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi (Silfi & Wahyuni, 2021), yaitu:

1. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

Terdapat lima indikator pengukuran ketaatan aturan akuntansi (Arifah, 2017), yaitu:

1. Peryaratan pengungkapan, persyaratan pengungkapan menjadi hal yang sangat penting karena setiap entitas akuntansi diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan serta informasi akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, melalui laporan keuangan dan kinerja suatu entitas akuntansi menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi publik dengan itu pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas.

3. Objektif, prinsip objektif mengharuskan pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja untuk bersikap jujur secara intelektual yang berarti bahwa informasi dalam laporan tersebut harus menggambarkan seluruh transaksi atau peristiwa lainnya yang terjadi.
4. Memenuhi syarat kehati-hatian, berarti pembuat laporan keuangan harus memiliki kewajiban dalam bersikap menjalankan tugasnya agar dari hasil laporannya dapat memberikan informasi yang dapat dipahami, handal dan relevan bagi penggunanya.
5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian, perlakuan akuntansi dapat diterapkan pada kejadian yang sama namun juga bisa berubah dengan syarat metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, asimetri informasi, dan ketaatan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi sudah pernah dilakukan di antaranya:

Penelitian Budiantari et al. (2017) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, profesionalisme badan pengawas dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Populasi penelitian ini adalah seluruh LPD di Kecamatan Mengwi yang berjumlah 38 LPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* dengan total jumlah responden sebanyak 152 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. (2) Profesionalisme badan pengawas berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. (3) Moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Wijaya et al. (2017) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan *whistleblowing* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi pada penelitian ini yakni 108 orang pegawai LPD di Kecamatan Gerokgak. Populasi pada penelitian ini yakni 108 orang pegawai LPD di Kecamatan Gerokgak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan *whistleblowing* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Irwansyah & Syufriadi (2018) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 50 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Untuk kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Wulansari et al. (2019) meneliti pengaruh pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Sampel penelitian ini adalah 85 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Kalau & Leksair (2020) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel yang digunakan sebanyak 32 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi dan minimnya perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap menurunnya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Samanto & Setyaningsih (2020) meneliti pengaruh pengendalian intern, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi menggunakan karyawan PT. Eigerindo MPI yang berada di Jawa Tengah sebanyak 72 karyawan. Analisis yang digunakan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, asimetri informasi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Suryani & Marunduri (2020) meneliti pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel penelitian ini berjumlah 64 orang karyawan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Raharjo (2020) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, kompensasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh garda depan PT. Aseli Dagadu Djokdja yang berjumlah ± 2300 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* maka diperoleh 90 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada garda depan. Sedangkan kompensasi dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada garda depan.

Penelitian Santini & Wati (2021) meneliti pengaruh efektivitas pengendalian internal, budaya organisasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel penelitian ini berjumlah 68 orang menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengendalian internal dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaporan pendapatan untuk pajak hotel.

Penelitian Silfi & Wahyuni (2021) meneliti budaya organisasi sebagai pemoderasi pengaruh antara asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan sampel sebanyak 90 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

MRA (moderasi). Hasil penelitian ini menunjukkan asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Riyadi (2021) meneliti pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 orang menggunakan teknik pengambilan sampel purposif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Pramesti & Wulanditya (2021) meneliti moralitas individu, kesesuaian kompensasi, dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Partisipan penelitian ini sebanyak 84 mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara individu yang memiliki level moralitas yang tinggi dan individu yang memiliki level moralitas yang rendah dalam melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Tidak terdapat perbedaan antara individu yang memperoleh kompensasi yang sesuai dengan individu yang memperoleh kompensasi yang tidak sesuai dalam melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Pujayani & Dewi (2021) meneliti pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada

Lembaga Perkreditan Desa Se-Kabupaten Buleleng. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LPD Se-Kabupaten Buleleng yang berjumlah 169 LPD. Metode penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 orang responden. Data kemudian dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel moralitas individu (X1), efektivitas pengendalian internal (X3), budaya organisasi (X4) memiliki pengaruh yang negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y). Sedangkan variabel asimetri informasi (X2) memiliki pengaruh yang positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Y).

Penelitian Apriana & Ayu (2021) meneliti pengaruh asimetri informasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel yang digunakan dengan jumlah 108 responden. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Kesumawati & Pramuki (2021) meneliti pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Se-Desa Batubulan dengan jumlah partisipan sebanyak 70 partisipan. Metode pengumpulan sampel yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sedangkan moralitas berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, asimetri informasi, dan ketaatan akuntansi sebagai variabel bebas dan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, serta beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain sebagai variabel bebas.

